



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com



PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI BADAN PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Palembang, 12 Maret 2026



INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si. CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP) Tahun Anggaran 2025

**BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Wijaya 1 No. 5 A, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan

DAFTAR ISI

PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN..... 2

1.1. Latar Belakang..... 6

1.2. Isu- Isu Strategis.....X

1.3. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....X

1.4. Sistematika Penulisan.....X

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2025.....x

1.6. Langkah Perbaikan Internal OPD.....x

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 6

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Penghubung..... 8

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

2.4. Perjanjian Kinerja tahun 2025

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja.....

3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....

3.2. Realisasi Anggaran

3.3. Inovasi

3.4. Penghargaan

BAB IV PENUTUP..... 11

4.1. Kesimpulan.....15

4.2. Rekomendasi.....16

PENGANTAR

Untuk meujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang kredibel dan dapat dipercaya oleh masyarakat, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dimana salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap OPD adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu (1) Tahun Anggaran. Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan di Jabarkan dalam bentuk LKjIP Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan secara garis besar berbagai kegiatan di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 ini juga disusun dalam upaya evaluasi pelaksanaan tugas selama Tahun 2025.

Penyusunan LkjIP Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu tolak ukur dari Kinerja Instansi Pemerintah, Khususnya Badan Penghubung dan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhana wa ta 'ala senantiasa melindungi kita semua.

Jakarta, Januari 2026
**KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROV. SUMATERA SELATAN
DI JAKARTA**




M.A. DEDY RAHMADI, S.E.
PENATA TK. I / III.d
NIP. 197207252006041009

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan LKJIP ini bertujuan untuk mengukur capaian kinerja, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai sarana evaluasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan. Selain itu, LKJIP menjadi wujud komitmen terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan good governance dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.2. ISU- ISU STRATEGIS

Isu–isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam peningkatan pelayanan karena dampaknya yang signifikan dimasa mendatang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian atau masalah yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelayanan kepada masyarakat dan aparatur dalam jangka panjang. Merujuk pada Rencana Strategis 2024-2026 maka dapat ditetapkan isu strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- 1. Penguatan fungsi koordinasi & komunikasi efektif antara pemerintah daerah dan pusat.
- 2. Optimalisasi promosi daerah berbasis data dan teknologi digital yang ramah lingkungan.
- 3. Pemanfaatan jejaring diaspora untuk memperkuat diplomasi daerah dan peluang investasi.
- 4. Peningkatan efektivitas fasilitasi kerjasama daerah dengan pusat dan antar daerah.
- 5. Penguatan kompetensi SDM penghubung dalam bidang diplomasi, digital, dan lintas budaya.

1.3. DUKUNGAN SDM, SARANA – PRASARANA DAN ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah didukung oleh Sumber Daya Manusia Sebanyak 98 Orang yang terdiri dari Pejabat Struktural, Staf Non Struktural, PPPK Penuh Waktu, PPPK Paruh Waktu dan Tenaga Outsourcing, dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Per Desember 2025
Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan

No	Pegawai	Jumlah
1	Eselon III	1
2	Eselon IV	4
3	Staf Non Struktural	32
4	PPPK Penuh Waktu	25
5	PPPK Paruh Waktu	11
6	Outsourcing	10
	Jumlah (Orang)	83

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Pegawai Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 83 Orang dengan Rincian Pegawai Eselon III sebanyak 1 orang, Pegawai Eselon IV sebanyak 4 Orang, Staf Non Struktural sebanyak 32 Orang, PPPK Penuh Waktu sebanyak 25 Orang, PPPK Paruh Waktu sebanyak 11 orang dan Pegawai Outsourcing sebanyak 10 Orang.

Dari jumlah pegawai yang ada di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan dapat diklasifikasikan sebagaimana dilihat pada tabel berikut :

1. Jumlah Pegawai Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2025.

Tabel.1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per Desember 2025
Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan

No.	Tingkat Pendidikan	Gender		Jumlah
		LK	PR	
1.	Strata Dua (S ₂)	1	1	2 orang
2.	Strata Satu (S ₁)	12	24	36 orang
3.	Sarjana Muda (D III)	1	-	1 orang
4.	SLTA/SMA	18	5	23 orang
5.	SLTP/ SMP	11	-	11 orang
6.	SD	10	-	10 orang
Total		53	30	83 Orang

Dari tabel diatas dapat djelaskan bahwa jumlah pegawai Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Tingkat Pendidikan, jumlah pegawai dengan tingkat Pendidikan terbanyak yaitu pada Pendidikan S1 sebanyak 36 orang dan tingkat pendidikan terendah pada Pendidikan D3 sebanyak masing-masing 1 orang.

2. Jumlah Pegawai Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2025.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Per Desember 2025
Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan

3. Jumlah Pegawai Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Golongan tahun 2025.

1.4 Sistematis Penulisan

Penulisan LKjIP Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang dibentuknya Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan, isu-isu strategis yang dihadapi Badan Penghubung serta kondisi SDM, sarana dan prasarana dan Anggaran yang dimiliki oleh Badan Penghubung selama satu Tahun Anggaran 2025. Dalam bab ini juga memuat keterangan LHE SAKIP 2025 beserta tindak lanjutnya serta langkah internal Badan Penghubung dalam meningkatkan kinerja.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang tujuan, sasaran dan indikator Badan Penghubung, strategi dan kebijakan apa saja yang diambil oleh Badan Penghubung dalam mewujudkan tujuannya.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini memuat penjelasan tentang pengukuran kinerja, analisis Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, efisiensi Anggaran serta Penghargaan-penghargaan yang pernah diraih oleh Badan Penghubung.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi.

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Pada tahun 2025, berdasarkan evaluasi dari Inspektorat, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai **83,70** dengan kategori penilaian A (Memuaskan). Di bawah ini merupakan tabel Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025 beserta tindak lanjutnya;

1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Penghubung

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan visi, misi, usulan, sasaran, strategi dan kebijakan organisasi dengan mempertimbangkan kajian lingkungan internal dan eksternal.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi. Semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada rencana strategi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, dimana tujuan yang akan dicapai oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan didasarkan rumusan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan aparatur yang memiliki Sumber Daya Masyarakat yang profesional
Misi ini ditujukan untuk peningkatan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan sasaran yang dicapai sebagai berikut :
 - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur ;
 - Meningkatkan kerja sama antar Lembaga / Departemen Pemerintah / Non Pemerintah.
- b. Mewujudkan layanan publik sesuai tuntutan dan kebutuhan aparatur Pemerintah Daerah dan Pusat serta Masyarakat
Misi ini untuk meningkatkan pelayanan publik dengan tuntutan kebutuhan Pemerintah provinsi Sumatera Selatan, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
 - Tersedianya sarana transportasi yang memadai bagi pejabat daerah yang bertugas/dinas ke Jakarta;
 - Mampu bertindak cepat dan tanggap terhadap permasalahan daerah yang akan diselesaikan di tingkat pusat;
 - Mampu bertindak dan memberikan kepercayaan terhadap pihak lain untuk datang berinvestasi di daerah.
- c. Mewujudkan promosi seni budaya, potensi sumber daya alam dan pariwisata sebagai show window daerah sebagai daya tarik investasi Daerah dan Nasional.
Misi ini ditujukan untuk mendorong dan memajukan pembangunan promosi dengan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
 - Meningkatkan layanan dan untuk penyebaran informasi;
 - Meningkatnya dukungan penyelenggaraan produk unggulan daerah.
- d. Mewujudkan hubungan antar lembaga yang harmonis antara kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Misi ini ditujukan untuk meningkatkan jalinan kemitraan maka sasaran yang

akan dicapai sebagai berikut :

- Optimalnya hubungan kerja dan kerjasama pembangunan antar lembaga Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat. Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah.

Sasaran adalah penjabaran pada penyusunan kegiatan, terinci dapat diukur dan dapat dicapai mengarah pada untuk sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang dicapai Badan Penghubung sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumberdaya aparatur yang lebih professional;
2. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap tugas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta;
3. Terjalin kerjasama yang dibangun antara Pemerintah Daerah dan Lembaga/Pemerintah serta Departemen/Non Departemen serta kerjasama Internasional;
4. Meningkatkan promosi kebudayaan Sumatera Selatan di Jakarta melalui pagelaran seni budaya dan pameran, baik di Anjungan TMII maupun event – event pameran di Jakarta;
5. Meningkatkan Pelayanan dan Protokoler;
6. Mempermudah penyelesaian berbagai kegiatan pejabat pemerintah daerah dan pekerjaan dinas.

B. PERJANJIAN KINERJA 2025

Setelah APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja dapat diuraikan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan dalam menunjang Tugas Pimpinan di Ibu Kota Jakarta	Indeks kepuasan terhadap layanan	%	83

A. CAPAIAN KINERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA SELATAN

Mendasarkan pada amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja.

Laporan kinerja merupakan laporan yang memberikan gambaran progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan secara transparan akuntabel. Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75-100%	Baik
3	55-74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan TA 2025 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Strategis (Renstra).

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan 2019 – 2025, Sasaran Strategis yang diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

1. Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tugas KDH/WKDH dan Unsur Pimpinan DPRD yang bertugas di Ibukota Jakarta	Nilai Survey Kepuasan KDH/WKDH dan Unsur Pimpinan DPRD	100%	80,13%	100%	100%	100%

Pelayanan KDH/WKDH yang bertugas di Jakarta Tahun 2025 terealisasi sebesar 91,97%. Hal ini berarti bahwa pelayanan KDH/WKDH dan unsur Pimpinan

yang bertugas di Jakarta berjalan dengan baik dan sesuai dengan target pencapaian 100%.

Kegiatan yang telah dilakukan di Jakarta meliputi Pembuatan Pas Bandara, Belanja Jasa Tenaga Kerja/Tenaga Lainnya (Vooridjer), Pelayanan Protokol KDH / WKDH ,Setda serta Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mengkoordinasikan acara-acara kedinasan di Jakarta dan sekitarnya.

Penggunaan anggaran keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 495.000.000,-. Dari anggaran tersebut terealisasi Rp. 396.663.936,- (80,13%).

Pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Pelayanan Penghubung.

2. Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinis yang sesuai dengan SOP	100%	93,43%	100%	100%	100%

Meningkatnya Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2025 terealisasi sebesar 93,43%. Hal ini berarti bahwa kegiatan Belanja Rutin berjalan dengan baik dan sesuai dengan target pencapaian 100%.

Kegiatan yang telah dilakukan di Jakarta meliputi Kegiatan:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, , Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Penggunaan anggaran keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 15.945.078.972,-. Dari total anggaran tersebut terealisasi Rp. 14.897.239.316,- (93,43 %).

Pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

3. Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi dan Ekspose Sumatera Selatan di Ibukota Jakarta	1. Jumlah laporan informasi potensi daerah Sumatera Selatan yang terbaru yang dapat diberikan	100%	100%	100%	85%	100%
	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Anjungan Sumatera Selatan	100%	100%	100%	85%	100%
Memperkuat Silaturahmi Masyarakat dan Mahasiswa Sumatera Selatan di Ibukota	Jumlah laporan komunitas asal Sumatera Selatan di Ibukota Jakarta yang akrab	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	6 Laporan

Pengelolaan Keragaman Budaya Tahun 2025 terealisasi sebesar 92,36%. Hal ini berarti bahwa Pengelolaan Keragaman Budaya berjalan dengan baik dan sesuai dengan target pencapaian 100%. Kegiatan yang telah dilakukan di Jakarta meliputi Pekan Acara TMII yang diselenggarakan di Anjungan Sumatera Selatan TMII.

Penggunaan anggaran keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini semula adalah Rp 315.000.000,-. Dari total anggaran tersebut terealisasi Rp. 290.937.934,- (92,36%).

4. Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2024	% Capaian Thd Target Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Kepuasan OPD yang menjadi mitra kerja	100 %	100%	100%	100 %	100 %

Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Tahun 2025 terealisasi sebesar 99%. Hal ini berarti bahwa Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target pencapaian 100%. Kegiatan yang telah dilakukan di Jakarta meliputi Pelayanan Koordinasi.

Penggunaan anggaran keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini semula adalah Rp 145.000.000,-. Dari total anggaran tersebut terealisasi Rp. 144.956.962,- (99,97%).

B. REALISASI ANGGARAN

Capaian realisasi keuangan atas pengelolaan APBD TA 2025 pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan tercapai sebesar 94,50%. Adapun untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tingkat pencapaian kinerja sesuai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025, berikut disajikan tabel Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Pagu Anggaran)		Target (%)	Realisasi Anggaran (%)		SILPA	Permasalahan
1		2	3		4	5
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.945.078.972	100	14.897.239.316	93,43	1.047.839.656	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	100	20.000.000	100,00	-	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	100	10.000.000	100,00	-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	100	10.000.000	100,00	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.445.902.329	100	5.733.161.650	88,94	712.740.679	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.263.622.329	100	5.573.811.650	88,99	689.810.679	adanya pegawai yang mengajukan pensiun dini serta dilakukannya pencadangan anggaran untuk mengantisipasi rencana kenaikan gaji, sehingga realisasi belanja gaji lebih rendah dari yang dianggarkan.
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	182.280.000	100	159.350.000	87,42	22.930.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000	100	5.000.000	100,00	-	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	100	5.000.000	100,00	-	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000	100	60.000.000	100,00	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000	100	60.000.000	100,00	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.951.270.171	100	1.949.512.392	99,91	1.757.779	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	170.000.000	100	169.991.500	100,00	8.500	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	250.000.000	100	248.640.000	99,46	1.360.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	358.000.000	100	357.717.009	99,92	282.991	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	100	199.917.780	99,96	82.220	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	973.270.171	100	973.246.103	100,00	24.068	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	525.000.000	100	500.775.000	95,39	24.225.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000	100	276.000.000	92,00	24.000.000	penyesuaian spesifikasi kebutuhan dengan kondisi aktual, sehingga nilai pengadaan menjadi lebih efisien dan tidak seluruh anggaran terserap.
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	225.000.000	101	224.775.000	99,90	225.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.252.533.472	100	2.977.966.182	91,56	274.567.290	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	100	29.365.800	97,89	634.200	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	307.785.472	100	245.217.867	79,67	62.567.605	karena efisiensi pemakaian serta penyesuaian kebutuhan operasional dengan kondisi aktual
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.914.748.000	100	2.703.382.515	92,75	211.365.485	karena efisiensi pemakaian serta penyesuaian kebutuhan operasional dengan kondisi aktual
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.685.373.000	100	3.650.824.092	99,06	34.548.908	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.865.000.000	100	2.831.546.267	98,83	33.453.733	karena efisiensi pemakaian serta penyesuaian kebutuhan operasional dengan kondisi aktual
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	270.373.000	100	269.886.000	99,82	487.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	550.000.000	100	549.391.825	99,89	608.175	
Program Pelayanan Penghubung	955.000.000	100	832.558.832	87,18	122.441.168	
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	955.000.000	100	832.558.832	87,18	122.441.168	
Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	145.000.000	100	144.956.962	99,97	43.038	
Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	315.000.000	100	290.937.934	92,36	24.062.066	terjadi karena adanya arahan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan untuk menyesuaikan pelaksanaannya dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga sebagian anggaran tidak direalisasikan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	495.000.000	100	396.663.936	80,13	98.336.064	Anggaran pembuatan pas bandara hanya diperuntukkan bagi pegawai tertentu sesuai kebutuhan tugas, sedangkan SiLPA anggaran makan minum aktivitas lapangan terjadi karena penyesuaian pelaksanaan dengan ketentuan peraturan yang berlaku sehingga tidak seluruh

						anggaran direalisasikan.
TOTAL	16.900.078.972	100	15.729.798.148	93,08	1.170.280.824	

Realisasi belanja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025 sebesar Rp 15.729.798.148,- (93,08%).

A. KESIMPULAN

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan adalah OPD yang mempunyai Tugas membantu / melayani KDH/WKDH dan Unsur Pimpinan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM dan sumber dana serta sarana dan prasarana yang efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data di atas, maka kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan selama Tahun 2025 yang dilakukan dengan beberapa Program dan Kegiatan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Pelayanan Publik bagi KDH/WKDH dan Unsur Pimpinan Daerah Sumatera Selatan”.

Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis adalah sebesar 100% atau Kategori Baik. Tercapainya nilai tersebut memperlihatkan bahwa Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan mampu melaksanakan Program dan Kegiatan dengan berpedoman kepada rencana Strategis 2025-2029, Dokumen Penggunaan Anggaran Tahun 2025 serta memperhatikan Indikator Kinerja Utama.

Alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 adalah sebagai Berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 16.125.078.972,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 14.980.383.148,-.
2. Belanja Modal sebesar Rp. 775.000.000,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 749.415.000,-.

Dengan terciptanya sasaran tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya tujuan organisasi dan semangat kerja yang lebih baik lagi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 pada dasarnya menyajikan informasi pengukuran Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan dan Analisis Akuntabilitas Kinerja. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) diharapkan dapat memberikan kontribusi dan mendorong terwujudnya *Good Governance* di Sumatera Selatan dan kepercayaan Masyarakat akan keberadaan dan tanggung jawab yang baik dari Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.

B. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Permasalahan dan kendala yang ini temukan dalam pencapaian target kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 antara lain :

1. Masih belum optimalnya kompetensi dan kapabilitas Sumber Daya Manusia yang handal dan Profesional baik segi kualitas maupun kuantitas;
2. Masih kurangnya apresiasi masyarakat terutama generasi muda untuk mempromosikan budaya Sumatera Selatan agar dikenal oleh masyarakat luas;
3. Masih belum lengkapnya fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai guna meningkatkan promosi seni dan budaya daerah di Anjungan Sumatera Selatan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta;

C. SARAN

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di masa mendatang antara lain :

1. Penambahan SDM yang kompeten pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan serta mengoptimalkan Kompetensi dan Kapabilitas SDM yang sudah tersedia melalui mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan maupun pihak lain agar terbentuk Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
2. Meningkatkan promosi mengenai kesenian dan budaya Sumatera Selatan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Jakarta terutama generasi muda, karena dengan melakukan promosi kesenian budaya Sumatera Selatan dengan sasaran generasi muda dikarenakan dapat mengoptimalkan promosi dengan pengguna media sosial dan teknologi yang terbaru.
3. Melakukan perbaikan-perbaikan, perawatan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana Anjungan Sumatera Selatan TMII guna kenyamanan dan peningkatan jumlah pengunjung yang hadir disetiap pertunjukan yang digelar di Anjungan Sumatera Selatan TMII.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan dapat.

Jakarta, Januari 2026
**KEPALA BADAN PENGHUBUNG
 PROV. SUMATERA SELATAN
 DI JAKARTA**




M.A. DEDY RAHMADI, S.E.
 PEMBINA / IV.a
 NIP. 197207252006041009